

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penanggulangan kelaparan dan kemiskinan merupakan salah satu tujuan Pembangunan *Milenium* (MDGs) untuk pembangunan global. Sesuai Pembukaan UUD 1945 ayat empat, tujuan pembangunan di Indonesia adalah memajukan kesejahteraan seluruh rakyat. Tingkat kemiskinan yang rendah merupakan salah satu indikator keberhasilan sebuah negara. Jumlah pendapatan per kapita dan kesejahteraan sosial berkorelasi positif, sedangkan kemiskinan dan ketimpangan berkorelasi negatif (Ginting, 2016).

Kemiskinan merupakan sebuah masalah mendasar yang menjadi perhatian dari setiap negara termasuk Indonesia, berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat telah melekat di Indonesia antara lain : Permasalahan tingginya angka kemiskinan, banyaknya pengangguran, lingkungan hidup dan permasalahan lainnya.

Kemiskinan dapat diartikan sebagai sebuah kondisi dimana seseorang yang memiliki keterbatasan atau bahkan tidak dapat memenuhi hak-hak dan kebutuhannya untuk mempertahankan serta mengembangkan taraf hidupnya yang dapat mengeluarkan dirinya dari zona kemiskinan. Hal ini terjadi karena beberapa faktor di antaranya: rendahnya pendapatan, terbatasnya lapangan pekerjaan, lambatnya pertumbuhan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta minimnya keterampilan masyarakat (Dinata, 2020). Kemiskinan bukan hanya menyangkut persoalan ekonomi akan tetapi menyangkut juga masalah sosial, budaya dan politik (Sayifullah & Gandasari, 2016).

Peningkatan kinerja perekonomian merupakan tujuan pembangunan dalam rangka menyediakan lapangan kerja dan penghidupan bagi semua orang, yang pada akhirnya akan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah mengurangi jumlah penduduk miskin. Kemiskinan adalah salah satu penyakit ekonomi yang harus diobati, atau paling tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan sangatlah rumit dan memiliki banyak segi (Todaro & Smith, 2020). Oleh karena itu,

upaya pengentasan kemiskinan harus terkoordinasi, mencakup semua hal, dan terfokus pada setiap aspek kehidupan masyarakat.

Banyak ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu, termasuk ekonom dan sosiolog, telah menyelidiki kemiskinan dalam komunitas ilmiah. Meskipun demikian, kemiskinan masih merupakan masalah yang serius karena berdampak pada tujuan pembangunan negara. Kemiskinan merupakan akar permasalahan dari banyak permasalahan penting yang perlu diselesaikan, seperti kesenjangan di dalam dan antar segmen penduduk serta antar wilayah. Oleh karena itu, para pelaku ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan, serta pemerintah, harus memerangi kemiskinan melalui program-program pembangunannya.

Ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, maka ia dikatakan berada dalam kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia hanya dapat mengurangi penderitaan masyarakat miskin dibandingkan mengatasi atau menyelesaikan masalah tersebut. Dari sudut pandang agama, hal ini sebenarnya cukup jelas. Ada garis pemisah dalam Islam antara yang miskin dan yang lebih miskin (Faqir). Orang faqir adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan orang miskin adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (Yuli, 2013).

Firman Allah S.W.T dalam surah Al-hasyr 59: 7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَاللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya (Q.S Al-Hasyr : 59 ayat (7)).

Jelas dari ayat di atas bahwa uang tidak boleh terdistribusi pada segelintir orang saja akan tetapi harta(uang) harus terdistribusi untuk seluruh golongan, antara lain Ibnu Sabil, fakir miskin, dan anak yatim. Surat ini memberikan

gambaran bahwa distribusi harta harus menyeluruh ke semua golongan melalui orang-orang yang berkecukupan diwajibkan untuk membayar zakat, membantu fakir miskin, anak yatim, dan ibnu sabil Hal ini dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat.

Tabel 1.1
Data Kemiskinan Di Indonesia dari tahun 2012 hingga 2022

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Presentase
1	2012	29,13 juta	11,96%
2	2013	28,07 juta	11,37%
3	2014	27,73 juta	10,96%
4	2015	28,59 juta	11,22%
5	2016	28,01 juta	10,86%
6	2017	26,58 juta	10,12%
7	2018	25,95 juta	9,82%
8	2019	25,14 juta	9,41%
9	2020	26,42 juta	9,78 %
10	2021	26,50 juta	9,71%.
11	2022	26,16 juta	9,54 %

Sumber : (BPS, 2012-2022)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah dan presentase penduduk miskin di Indonesia periode tahun 2012-2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016, mengalami penurunan untuk jumlah penduduk miskin dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 28,01 juta atau 10,86%. Secara bertahap pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Pelaksanaan berbagai program pro-rakyat dan memberikan fasilitas yang memadai agar mampu memenuhi dan mengakses berbagai pelayanan kebutuhan masyarakat.

Tujuan utama kebijakan pembangunan di banyak negara adalah untuk memberantas kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, yang pada dasarnya merupakan akar dari semua permasalahan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan untuk memerangi kemiskinan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan martabat keluarga. Ide ini sangat penting karena memberikan pandangan positif terhadap kehidupan kepada masyarakat miskin (Arifin, 2020).

Garis kemiskinan memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kemiskinan karena mereka yang berada di bawah garis kemiskinan dalam hal

pengeluaran per kapita bulanan seperti pengeluaran makanan maupun non makanan dianggap miskin. Sementara itu, baik di perkotaan maupun pedesaan, jenis makanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap garis kemiskinan seperti beras, gula, telur, ayam, daging sapi, dan mie cepat saji adalah beberapa contoh dari pengeluaran bulanan dalam sektor makanan. Begitupun pengeluaran per kapita bulanan untuk non makanan seperti biaya perumahan, listrik, bensin, pendidikan, dan peralatan mandi baik di perkotaan maupun pedesaan, biaya turut berkontribusi dalam menambah garis kemiskinan secara signifikan jika menyangkut barang-barang non-makanan (Ferezagia, 2018).

Tingkat Indeks Pembangunan Manusia juga memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan karena ketika Indeks Pembangunan Manusia di suatu daerah baik maka akan menjadi baik tingkat pembangunan di daerah tersebut. Adapun indikator dari IPM itu sendiri adalah: *Pertama*, Angka harapan hidup; *Kedua*, Tingkat Pendidikan; *Ketiga*, Tingkat Penghidupan yang layak. Dalam kaitannya 3 indikator ini berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di suatu daerah (Lily & Sari, 2019).

Menurut Andini & Mandasari (2017) jalinan antara kemiskinan dan keterbelakangan dengan beberapa aspek ekonomi dan non ekonomi. Tiga komponen utama sebagai faktor penyebab keterbelakangan dan kemiskinan masyarakat, adalah: 1) rendahnya taraf hidup, 2) Rendahnya rasa percaya diri masyarakat, 3) Terbatasnya kebebasan. Dimana ketiga aspek ini memiliki *feedback* satu sama lainnya. Rendahnya taraf hidup masyarakat disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. Rendahnya pendapatan disebabkan oleh rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja. Rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja disebabkan oleh tingginya pertumbuhan tenaga kerja, tingginya angka pengangguran dan rendahnya investasi perkapita. Dalam hal ini Indeks pembangunan manusia adalah faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia.

Kemiskinan juga diakibatkan oleh banyaknya jumlah pengangguran, pengangguran disini adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan, hal ini terjadi karena minimnya lapangan kerja dan kesempatan berkarir bagi setiap orang. Jumlah lapangan kerja yang cukup dapat menyerap tenaga kerja dan partisipasi kerja guna mengurangi tingkat pengangguran (Masinanbow &

Sembiring, 2023). Dan menurut Arifin (2020) Masih banyak permasalahan yang berkontribusi terhadap kemiskinan antara lain rendahnya tingkat pendidikan, tingginya tingkat kesulitan ekonomi, kurangnya kesempatan kerja, sehingga masih banyak masyarakat yang menganggur, dan menerima upah rendah, serta persoalan pembangunan yang tidak merata. Oleh karena itu, Pemerintah diharapkan mampu memberikan lapangan kerja dan kesempatan berkarir bagi setiap masyarakat dengan diberi kemudahan dalam meningkatkan karir dari masyarakat.

Pemberian bantuan dari pihak berwenang merupakan salah satu cara untuk memerangi kemiskinan; hal ini merupakan kewenangan pemerintah dan berkaitan dengan Indonesia. Oleh karena itu, sebagian aliran pendapatan Negara harus dialokasikan untuk memerangi kemiskinan, pemerintah juga wajib menyediakan kebutuhan setiap warga negara melalui sumber pembiayaan yang tepat (Ilmi, 2017).

Tabel 1.2
Provinsi Tertinggi Jumlah Kemiskinan di Indonesia

No	Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin	
		Kota	Desa
1	Jawa Timur	4.181,29	4.236,51
2	Jawa Barat	4.070,98	4.053,62
3	Jawa Tengah	3.831,44	3.858,23

Sumber : (Badan Pusat Statistik Nasional, 2022)

Di Provinsi Jawa Barat permasalahan yang paling kompleks dan sering terjadi adalah permasalahan kemiskinan dimana dengan adanya kemiskinan menyebabkan ekonomi masyarakat menjadi menurun dan pendapatan masyarakat ikut menurun. Menurut data tabel 1.2 dijelaskan bahwa dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia didominasi oleh 3 provinsi jawa dan Provinsi Jawa Barat menduduki posisi kedua setelah Provinsi Jawa Timur. Hal ini disebabkan karena masih ditemukannya ketimpangan dalam retribusi pendapatan di masyarakat Provinsi Jawa Barat.

Berbicara kemiskinan di Jawa Barat, ditemukan faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan di Jawa Barat antara lain kurangnya penguasaan teknologi, pendidikan, investasi, pengangguran, upah minimum, pertumbuhan ekonomi,

demokrasi, inflasi, pengangguran terbuka, dan pendapatan (Chairunnisa & Qintharah, 2022).

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang tidak terlepas dari kemiskinan. Hal ini dikarenakan hampir semua kota dan kabupaten yang ada di provinsi Jawa Barat memiliki penduduk miskin. Berikut data tingkat kemiskinan, Pengangguran dan Indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat.

TABEL 1.3
Data Kemiskinan, Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia di
Jawa Barat periode 2012-2022

Tahun	Kemiskinan	Pengangguran	Indeks Pembangunan Manusia
2012	9.88%	9.08%	67.32%
2013	9.61 %	9.22%	68.25%
2014	9.18%	8.45%	68.80%
2015	9.53 %	8.72 %	69.50%
2016	8.95%	8.89%	70.05%
2017	8.71%	8.22%	70.69%
2018	7.45 %	8.23%	71.30%
2019	6.91 %	8.04%	72.03%
2020	7.88%	10.46%	72.09%
2021	8.40%	9.82%	72.45%
2022	8.06%	8.31%	73.12%

Sumber : (BPS JAWABARAT, 2012-2022)

Tabel 1.3 menjelaskan bahwa presentase tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Presentase kemiskinan tertinggi di tempati pada tahun 2012 dengan presentase 9.88%, lalu di tahun berikutnya hingga tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 6.91%, di tahun 2020-2021 mengalami peningkatan hingga menjadi 8.40% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan dari yang sebelumnya 8.40% menjadi 8.06%.

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat bersifat fluktuasi dari tahun ke tahun. Presentase tingkat pengangguran tertinggi ditempati pada tahun 2020 dengan presentase tingkat pengangguran sebesar 10.46% dan presentase tingkat pengangguran terbuka terendah di tempat pada tahun 2019 dengan presentase tingkat pengangguran sebesar 8.04%. dan

presentase tingkat pengangguran di tahun selainnya mengalami naik turun atau berfluktuasi.

Dan pada tabel 1.3 juga menjelaskan bahwa IPM Jawa Barat selalu mengalami peningkatan dari 67.32% pada tahun 2012 menjadi 72.45% pada tahun 2021 kecuali di tahun 2022 mengalami penurunan dari semula tahun sebelumnya menjadi 73.12%. Peningkatan angka IPM yang ada di Jawa Barat ini dikarenakan terdapat indikator pendorong dalam peningkatan angka IPM. Karena pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperlihatkan tiga aspek esensial yaitu umur panjang, hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak.

Meskipun kasus kemiskinan di Provinsi Jawa Barat terbilang menurun tiap tahunnya, namun masih banyak ditemukan penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat (Berliani, 2021). Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah melakukan berbagai upaya dalam pengentasan kemiskinan namun belum dapat dikatakan optimal, hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya penduduk miskin dan jumlah pengangguran yang ada di Provinsi Jawa Barat (Nugraha, 2023). Rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi permasalahan utama bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mana tingkat pendidikan di Provinsi Jawa Barat hanya 8 tahun atau setara dengan Sekolah Menengah (Chairunnisa & Qintharah, 2022).

Penelitian terkait Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat telah diteliti sebelumnya oleh penelitian terdahulu yaitu Iksan & Arka (2022) dengan variabel yang diuji upah, pendidikan, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan uji analisis jalur. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengamati bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Barat Keterbatasan lapangan pekerjaan dan tingginya tingkat pengangguran.
2. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat.

3. Tidak meratanya distribusi pendapatan masyarakat.

C. **Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel penelitian ini adalah mengenai Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, dan Kemiskinan
2. Pemilihan obyek yang dipilih adalah Provinsi Jawa Barat
3. Penelitian dilakukan Selama periode 2012-2022

D. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna mengetahui :

1. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia secara parsial terhadap Kemiskinan ?
2. Bagaimana pengaruh Pengangguran secara parsial terhadap Kemiskinan?
3. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran secara simultan terhadap Kemiskinan?

E. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan
2. Untuk mengetahui Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan
3. Untuk mengetahui Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran terbuka terhadap Kemiskinan secara simultan

F. **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis terkait dengan pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan, wawasan atau ilmu pengetahuan sehingga nantinya masyarakat dapat memahami terkait dengan pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk pembuatan karya ilmiah dan penelitian lanjutan terkait dengan pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian Ilmiah akan mudah untuk dibaca jika skema yang ditempuh jelas dan mengarah sesuai tujuan

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang latarbelakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan berbagai teori atau *study* pustaka yang berkaitan dengan obyek penelitian, yang meliputi teori Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, hingga teori kemiskinan, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan hipotesis.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti, mulai dari tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian,

Sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional, instrument penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan, yaitu mengenai “pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran terbuka, terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Barat 2012-2022”.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan beserta saran berdasarkan hasil penelitian.

